

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, bersyukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan pembuatan rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2026. Dengan keterbukaan dan senang hati diharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 – 2026.

Akhir kata, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya ini dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya sendiri dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada umumnya.

SIKABAU,

2021

KEPALA

RENO LAZUARDI, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. I/ IVb

NIP. 19751223 200012 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
SK TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
SK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	8 - 21
2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya	13
2.3 Kinerja Pelayanan	17
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	22 -27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	22
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah.....	24
3.3 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga	25
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kondisi Lingkungan Strategis.....	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28 - 31
4.1 Tujuan Dan Sasaran	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32 - 35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEBIJAKAN SERTA PENDANAAN.....	36 - 43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44 - 45
BAB VIII PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini telah menjadi fasilitas utama diberbagai sektor kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan dan aktivitas manusia sehari-hari. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah cara hidup, cara belajar, cara bekerja dan cara bermain. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu pesat, mendorong berbagai kota di belahan dunia untuk menciptakan berbagai peluang dan industri TIK sebagai salah satu bentuk indikator peradaban masyarakat yang maju. Bahkan pemanfaatan dan perkembangan industri TIK diyakini dapat berperan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan-layanan pemerintah kepada publik. Pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri.

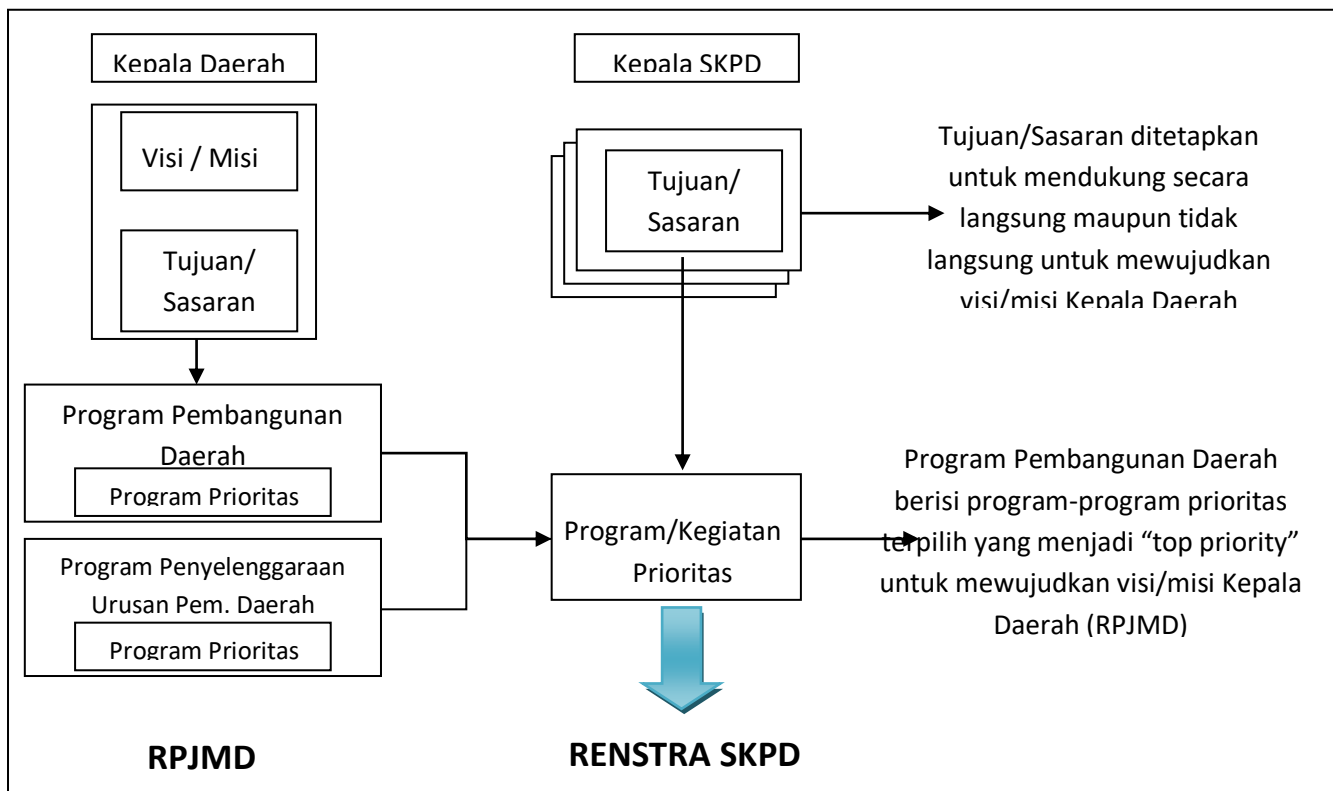
Oleh karena itu, dalam pengembangannya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen - elemen masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharma Raya sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi, informatika, statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD. Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Diskominfo juga berdasarkan pada kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026. Hubungan antara RPJMD dan Renstra-PD terlihat pada gambar 1.2



Gambar 1.2 Hubungan Renstra dan RPJMD

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dana Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan arah kebijakan perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang komunikasi, Informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Dharmasraya sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

b. Tujuan

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai gambaran tentang pencapaian kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, khususnya urusan Komunikasi dan Informatika 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai Visi, Misi Kabupaten Dharmasraya.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian kurun waktu 5 tahun kedepan.
4. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas dan sinergi pembangunan masyarakat dengan pemerintah.
5. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisa terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala Daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat Daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan prasyarat keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam mengimplementasikan seluruh Renstra ini.

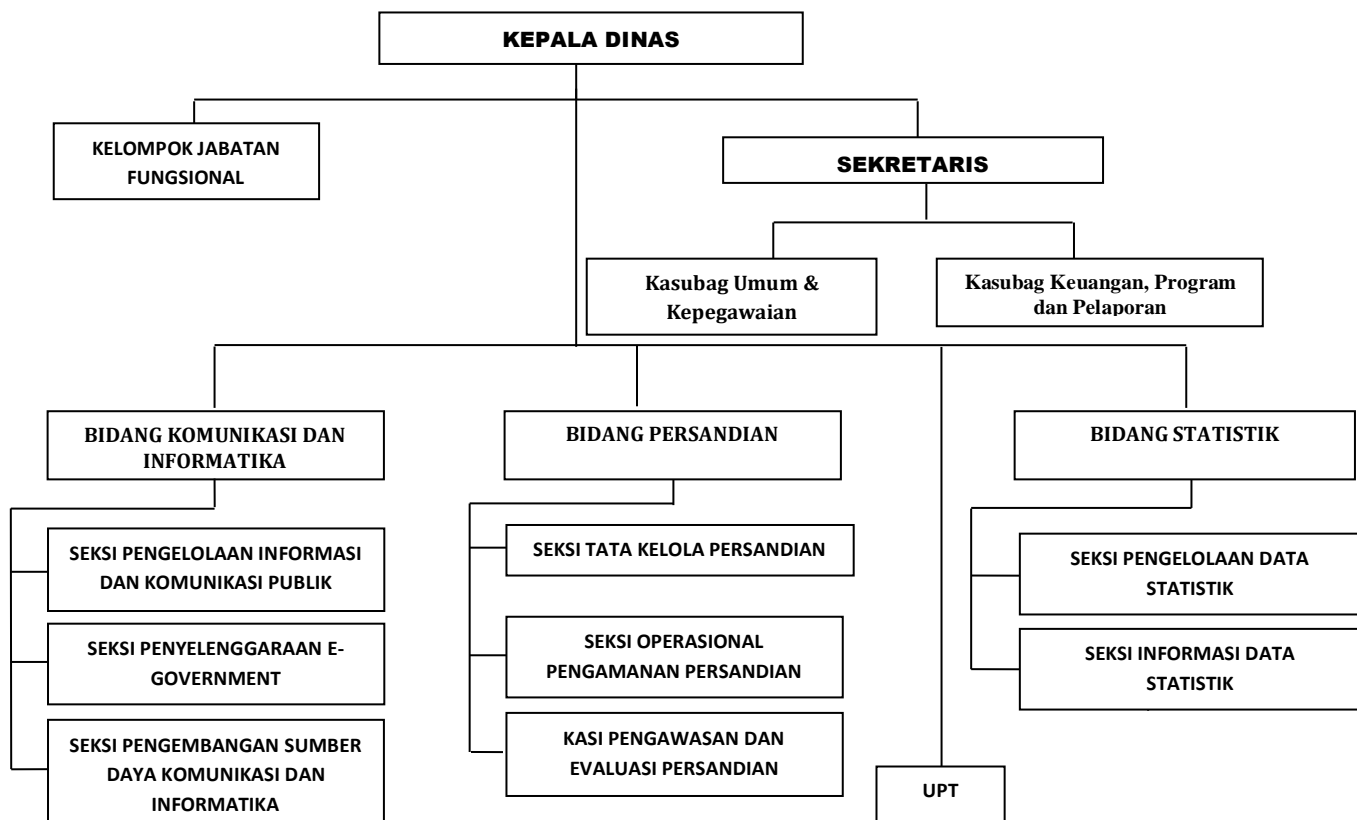
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64), dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, persandian dan statistik;
- d. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- e. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- f. merumuskan LPPD, LKPj, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- b. merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
- c. merumuskan LPPD, LKPj, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

- h. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

3. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika

Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perijinan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, dan pengembangan sumberdaya komunikasi, dan informatika. Untuk melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang, penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik,

penyelenggaraan e-government, dan pengembangan sumberdaya komunikasi, informatika;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
- h. pengembangan sumber daya komunikasi SKPD dan BUMD, layanan nama domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- i. pengembangan sumber daya TIK pemerintah kabupaten.
- j. penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
- k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Komunikasi dan informatika membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:

- 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2. Seksi Penyelenggaraan *e-Government*; dan
- 3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika.

4. Kepala Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Persandian. Dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Persandian di lingkungan pemerintah daerah;
- b. perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
- c. pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. pengelolaan sumber daya persandian Daerah;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian Daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

- g. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Persandian;
- h. penyelenggaraan kegiatan bidang Persandian;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Persandian;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas bidang Persandian; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:

- 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
- 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
- 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

4. Kepala Bidang statistik

Kepala Bidang statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mempersiapkan, menganalisis dan menginformasikan data data pembangunan dan mengkoordinasikannya dengan seluruh OPD dan stekholder terkait. Untuk melaksanakan tugas Bidang statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik melalui perencanaan program lingkup bidang Statistik;
- b. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang;
- c. pengkoordinasian rencana program dan kegiatan bidang statistik;
- d. menginventarisasi semua data statistik sektoral;
- e. pengkoordinasian dengan seluruh OPD dan stekholder terkait dalam penyusunan data statistik sektoral;
- f. menginformasikan data data statistik kepada seluruh OPD dan stekholder terkait;
- g. mengevaluasi ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral;
- h. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil, telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsi;
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

Bidang statistik membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:

- 1. Seksi Pengelolaan Data Statistik; dan
- 2. Seksi Informasi Data Statistik.

UPT (Unit Pelayanan Terpadu) dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum memiliki UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika belum terdapat ASN fungsional.

2.2 Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya saat ini sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang ASN, terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S-2	9 orang	
2.	S-1	11 orang	
3.	D-4	1 orang	
4.	D-3	1 orang	
5.	SLTA	1 orang	
	Jumlah	23 orang	

Tabel 2.2.2

Data Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2021

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Tk I/ IV b	1 orang	
2.	Pembina / IV a	6 orang	
3.	Penata Tk I/ III d	3 orang	
4.	Penata/ III c	2 orang	
5.	Penata Muda Tk I/ III b	5 orang	
6.	Penata Muda/ III a	4 orang	
7.	Penata Tk I/ II d	1 orang	
8.	Penata / II c	0 orang	
9.	Penata Muda Tk I/ II b	1 orang	
10	Penata Muda/ II a	0 orang	
	Jumlah	23 orang	

Tabel 2.2.3

Data Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Struktural	14 orang	
2.	Fungsional Tertentu	4 orang	
3.	Fungsional Pelaksana	5 Orang	
	Jumlah	23 orang	

Tabel 2.2.4

Data Pegawai berdasarkan Urusan

No	Urusan	Jumlah	Keterangan
1.	Sekretariat	6 Orang	
2.	Komunikasi dan Informatika	9 orang	
3.	Statistik	4 orang	
4.	Persandian	4 orang	
	Jumlah	23 orang	

Tabel 2.2.5

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 Yang Lulusan IT

No	Urusan	Jumlah	Keterangan
	PNS		
1.	Sarjana Komunikasi dan Informatika dan serumpun	12 orang	
2.	Sarjana Non Komunikasi dan Informatika	9 orang	
	Jumlah	21 orang	
	THL		
1.	Sarjana Komunikasi dan Informatika dan serumpun	6 orang	
2.	Sarjana Non Komunikasi dan Informatika	9 orang	
	Jumlah	15 orang	

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Disamping sumberdaya manusia, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diperlukan sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana/aset pendukung pelaksanaan program kegiatan. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 2.2.6
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	0	
2.	Bangunan	0	
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	2 Unit	1 rusak Sedang
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	2 unit	
5.	Server	7 unit	
6.	Modem	17 Unit	
7.	Indihome	17 x 100 Mbps	
8.	Astinet	40 Mbps	
9.	Komputer	11 Unit	2 Rusak Berat
10.	Laptop	11 Unit	4 Rusak Berat
11.	Meja Biro	5 Unit	
12.	Meja ½ Biro	20 unit	
13.	Kursi Tamu	2 unit	
14.	Kursi Putar	15 Unit	
15.	Kursi Futura	10 Unit	
16.	Kursi Plastik	20 Unit	10 Unit rusak
17.	Lemari Arsip Besar	2 Unit	
18.	Lemari Arsip Sedang	4 unit	
19.	Peta Blank Spot	1 Dokumen	
20.	Camera	1 unit	
21.	Proyektor	1 unit	
22.	Layar Proyektor	1 unit	
23.	Smart TV 75 inc, 70 inc dan 42 inc	3 unit	
24.	Kamera vidcon	2 unit	
25.	Lampu sorot	1 set	
26.	Wireless	1 set	
27.	Standing Portable	2 unit	

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya memanfaatkan tanah dan gedung bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas komunikasi dan Informatika menempati sebagian lantai II Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Asset pendukung lain berupa peta lokasi blank spot.

Sedangkan dalam kerangka pengembangan *electronic government (e-Government)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui implementasi *Digital Government Services (DGS)* telah dikembangkan interkoneksi jaringan internet yang menghubungkan setiap OPD di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Pengembangan jaringan ini diikuti penyediaan langganan bandwidth internet dengan kerjasama PT. Telkom Indonesia yang semakin besar dari tahun ke tahun. Meski demikian akses internet dirasakan masih kurang lancar, hal ini dimungkinkan karena semakin banyak yang mempergunakannya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan / atau indikator kinerja Pelayanan daerah dan / atau indikator lainnya seperti *MDG's (Millenium Development Goals)* atau indikator yang telah dirafikasi (pengesahan) oleh Pemerintah.

Pada bagian ini juga dapat dijelaskan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya menjadi dinas Definitif tepatnya pada tanggal 29 Desember 2016, sejak dilantiknya pejabat eselon II, III, dan IV pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya. Sejak itulah baru menyusun Renstra (Rencana Strategi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Kondisi bidang Komunikasi dan Informatika di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. masih belum terpenuhinya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten, masih ada beberapa wilayah *blank spot* yang memerlukan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut segera mendapatkan akses telekomunikasi. Swasta juga mengambil peran dengan mendirikan menara-menara seluler oleh operator BTS di wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Dharmasraya, sehingga *blank spot* terus berkurang. Dengan fasilitas komunikasi yang memadai, akan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Wilayah blank spot di Kabupaten Dharmasraya yang masih ada yaitu Nagari Banai Kec Sembilan Koto, Nagari Lubuk Karak Kec Sembilan Koto, Nagari Ranah Palabi Kec Timpeh, dan Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan.
2. Berdirinya radio-radio swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya. Program dari radio tersebut selain memberikan hiburan secara gratis kepada masyarakat, juga memberikan informasi tentang berbagai potensi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, namun sejak majunya akses internet perkembangan radio menjadi lebih sulit yang saat ini hanya eksis 2 unit saja.
3. untuk menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat. KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Di Kabupaten Dharmasraya baru terdapat 11 kelompok KIM, dimana terdapat 1 kelompok di setiap kecamatan.

4. Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Dharmasraya terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksi OPD se Kabupaten Dharmasraya dalam jaringan internet/intranet sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Saat ini sudah seluruh OPD terkoneksi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, namun kualitas koneksi masih rendah. Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas koneksi dan peningkatan koneksi di UPT kesehatan, UPT pendidikan, UPT pertanian, UPT PUPR, UPT DLH dan lainnya. Peningkatan koneksi ini akan mewujudkan pelayanan *smart city*.
5. Layanan *Maintenance* Jaringan Internet OPD merupakan layanan pemeliharaan jaringan internet di OPD yang mengalami hambatan baik akibat cuaca ataupun lainnya. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Peningkatan informasi OPD dilakukan pembuatan website di OPD dan Nagari setiap tahun, saat ini seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan dan Nagari telah memiliki website dan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan up date informasinya. Khusus website OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan website induk Kabbupaten Dharmasraya dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Inforatika.

Dalam bidang statistik di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan detail dalam buku PDRB menjadi PDRB menurut produksi dan PDRB menurut lapangan usaha terus dilakukan setiap tahun oleh statistik dan saat ini dilakukan juga publikasi melalui website.
2. Pembuatan website rumah data <http://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang dilakukan ditingkat nagari dengan launching Nagari Statistik di Nagari Sei Duo Kec. Sitiung, namun belum mampu mencapai seluruh nagari yang terkendala jaringan internet terintegrasi seluruh nagari. Nagari Statistik di Kab. Dharmasraya saat dilaunching merupakan satu-satunya di Indonesia yang melakukan up date data statistic setiap saat dan menjadi pilot project di Propinsi Sumatera Barat. Khusus pendataan melalui rumah data pada tahun 2020 terus dilakukan peningkatan kualitas dengan penyempurnaan website dan penambahan jenis Data.
3. Bidang statistik dituntut untuk dapat membuat Kabupaten Satu Data yang dapat mengalami pergerakan setiap saat dan dilaksanakan secara elektronik. Pemilik data dapat memberikan perubahan data setiap saat. Kompleksitas data juga akan dilaksanakan secara elektronik,

namun data yang dihasilkan diharapkan akurat, terpadu dan berkesinambungan sehingga perencanaan pembangunan akan dilaksanakan lebih tepat dan terpadu bagi masyarakat.

Dalam bidang persandian di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat kami jelaskan bahwa bidang persandian merupakan bidang baru yang dibebankan kepada daerah dan terus dilakukan berbagai upaya persiapan terutama regulasi hukum dalam pelaksanaan. Kegiatan dilakukan untuk pengamanan website sebanyak 21 website induk dan website subdomain. Selain itu, dilakukan pengamanan aplikasi yang dibangun oleh OPD dan berada di pusat server Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 4 (empat) jenis yaitu aplikasi SIPKD, Simda Keuangan, SKP Online, dan E-Disiplin.

Adapun realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1

Realisasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	0%	0%	32,43%	50%	94,74%	100%
2.	Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	0%	0%	15,30%	100%	100%	100%
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari	%	0%	0%	11,53%	21,00 %	21,00 %	21,00 %
4.	Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	%	0	0	54,05%	78,95%	100%	100%
5.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	0	0	0%	55,00%	55,00%	55,00%
6.	Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	%	0	0	75%	100%	100%	100%
7.	Hasil penilaian AKIP DISKOMINFO oleh Inspektorat Kab. Dharmasraya		0	0	C	C	B	B

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

- Tersedianya personil Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah 38 orang terdiri atas 14 pejabat struktural, 4 orang Fungsional tertentu, 5 Fungsional Pelaksana, 2 Orang Programmer dan 15 orang Tenaga Non PNS dengan 25 % berlatar belakang pendidikan Komputer
- Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, dan Informatika untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal, kreasi dan inovasi *team work* seluruh personil.
- Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut pengembangan E-Government
- Adanya sarana dan prasarana milik pemerintah daerah

2) Kelemahan

- Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat,
- Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi,
- Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
- Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD,
- Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
- Belum adanya basis data yang handal, akurat, terintegrasi dan berkesinambungan untuk seluruh kebutuhan pembangunan,
- Terbatasnya peralatan sandi yang berada di dalam negeri yang dapat diperoleh
- Belum terdapatnya standar keamanan informasi

b. Faktor Eksternal

1) Kekuatan

- Tingginya minat swasta dalam membangun sarana dan prasarana komunikasi (tower BTS) di masyarakat
- Meningkatnya minat masyarakat dalam menggunakan sarana komunikasi khususnya pemakaian HP.
- Berkembangnya media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat

2) Kelemahan

- Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi
- Kebebasan penggunaan media sosial.
- Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64). Di dalam Perda tersebut dijelaskan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, secara umum tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
3. Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi.
4. Mekanisme pengelolaan data yang belum terbentuk dalam suatu regulasi.
5. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data.
6. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat.
7. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi.

8. Internalisasi perubahan paradigma pengelolaan proses kerja dari manual ke elektronik di setiap OPD yang belum kuat.
9. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat.

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Statistik adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi data perencanaan pembangunan daerah
2. Sistem pengelolaan dan penyajian data masih secara parsial
3. Ketidakseragaman input data primer
4. Kelembagaan pengelolaan data belum mencerminkan kebutuhan dalam pembangunan
5. Belum adanya basis data yang handal, akurat, terintegrasi dan berkesinambungan untuk seluruh kebutuhan pembangunan
6. Kebutuhan akan tersedianya data dan informasi untuk indikator tertentu bergantung pada penyedia data
7. Data dan informasi pembangunan belum dianggap sebagai asset

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemui pada bidang Persandian adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan tenaga sumber daya manusia yang mampu mengelola persandian
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang bersifat khusus pengelolaan sandi
3. Terbatasnya peralatan sandi yang berada di dalam negeri yang dapat diperoleh
4. Belum adanya regulasi pusat dan daerah tentang persandian
5. Belum terdapatnya standar keamanan informasi

Faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Kab. Dharmasraya menjadi Kabupaten Dharmasraya sebagai Kabupaten Digital,
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.

- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Sebelum menetapkan Program Kerja Dinas, maka perlu dikaji secara mendalam Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terpilih yang dimuat dalam RPJMD 2021-2026. Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026, Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Tabel. 3.1
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI KABUPATEN	MISI KABUPATEN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing 4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan 6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutan Pembangunan Islamic Center. 2. Penyediaan Pasar Online dan Bantuan Modal UMKM 3. Rumah Digital dan Kreativitas Milenial 4. Taman Budaya dan Pengembangan Kelompok Seni 5. Memperkuat Program BPJS 6. Kursus Bahasa Asing Gratis 7. Pelayanan Publik Online 8. Insentif Sekolah dan Seragam Gratis 9. Alat Mesin Pertanian & Bibit Gratis 10. Peningkatan TPP 50% & Beasiswa Tugas Belajar 11. Kartu Ajaib Jaminan Hari Tua 12. Insentif Tokoh Agama dan Adat 13. Pengaspalan Jalan dan Jembatan Baru 14. Restorasi Sungai dan Hutan

Dengan memperhatikan matriks Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan tersebut di atas tampak jelas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan misi ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah dan berada dalam prioritas ke- 3 yaitu Rumah Digital dan Kreativitas Milenial dan prioritas ke 7 yaitu Pelayanan Publik Online yang tetap mendukung pencapaian seluruh program yang termaktub dalam proiritas pembangunan kabupaten. Pada prinsipnya pencapaian target program dinas komunikasi dan informatika tidak berdiri sendiri, namun mendukung keberhasilan seluruh program pembangunan untuk percepatan pelayanan publik yang handal, cepat, tepat, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan masyarakat yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik yang baik, hal tersebut menekankan pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keberanian masyarakat harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Kominfo, BSSN, BPS dan Renstra Propinsi

Sebagaimana disebutkan diawal, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2026. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sasaran Strategis Kemenkominfo dalam Rencana Strategis Kemenkominfo Tahun 2020-2024 bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 terdapat 5 (lima) sasaran yang akan terkait dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;

3. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; sasaran 1, 2 dan 3 ini dilaksanakan melalui program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; yang dilaksanakan melalui program Komunikasi Publik
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik yang dilaksanakan melalui program Dukungan manajemen pemerintah daerah

Sasaran Strategis BSSN dalam Rencana Strategis BSSN Tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) sasaran yang akan terkait dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima

Sasaran Strategis BPS dalam Rencana Strategis BPS Tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) sasaran yang akan terkait dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu

1. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta
2. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
3. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas
4. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Sasaran Strategis Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 terdapat 7 (tujuh) sasaran yang akan terkait dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)
2. Penjaminan kedaluatan informasi pemerintah di pemerintah daerah
3. Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan
4. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public
5. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa
6. Meningkatnya Desiminasi Informasi
7. Penyelnggaraan Operasional Komisi Informasi

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government.

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, diketahui bahwa pengembangan jaringan telekomunikasi didasarkan atas tingkat kebutuhan mengikuti tingkat perkembangan penduduk. Sistem jaringan telekomunikasi yang ingin dicapai terdiri atas:

a. Sistem jaringan kabel melalui program :

1. pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk pelayanan Pusat Kegiatan Utama Kabupaten (PKWp, PKL dan PPK);
2. pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel untuk pelayanan kawasan strategis Kabupaten.

b. Sistem jaringan nirkabel melalui program:

1. pengembangan jaringan komunikasi seluler melalui pembangunan Tower BTS (*Base Transmission Station*) bersama pada semua wilayah Kecamatan;
2. dalam jangka panjang mendorong penggunaan layanan telekomunikasi teknologi *wireless* yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

2. Telaah Lingkungan Strategis

Kabupaten Dharmasraya mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak diantara tiga provinsi yaitu Propinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Disamping itu Kabupaten Dharmasraya dibelah oleh jalur lintas sumatera yang menghubungkan pulau Sumatera sampai ke pulau Jawa.

Sebagai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi dan kabupten/kota lainnya, hal ini membuat masyarakat membutuhkan sebuah fasilitas komunikasi dan informasi yang lebih handal, sehingga keterbatasan dengan akses dengan pusat-pusat pemerintahan provinsi, kabupaten dn kota lainnya, menuntut masyarakat harus mempunyai fasilitas komunikasi dan informatika lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintah Provinsi dan Pusat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang masih jauh dari yang diharapkan, juga lihat dari jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informatika, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

- Keterbukaan Informasi Publik
- Komitmen terhadap e-government
- Percepatan Pelayanan dengan Layanan Elektronik
- Keamanan Sistem Elektronik
- Akurasi dan Ketepatan Data Pengambilan Kebijakan

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada tersebut maka terdapat beberapa program / kegiatan strategis yang harus dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan :

1. Pembangunan command center sebagai pusat pelaksanaan e-government di tahun awal yang disertai pengisian sarana dan prasarana command center di tahun kedua dan pelaksanaan rekrutment tenaga khusus operasional smart city di command center. Tahun ketiga, keempat dan kelima dilakukan pengelolaan government chief information officer (GCIO) pusat informasi pemerintahan dari command center dan dilakukan pelaksanaan pengembangan aplikasi baru pendukung smart city.
2. Dalam pengembangan aplikasi baru maka diperlukan keamanan informasi yang harus dilaksanakan assessment bersama BSSN oleh bidang persandian.
3. Untuk mendukung akurasi dan ketepatan data dalam pengambilan kebijakan maka pengembangan Nagari Statistik dan Kecamatan Statistik menjadi target strategis di bidang Statistik

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Setelah menelaah secara intensif Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya serta Prioritas Pembangunan Kabupaten Dharmasraya yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021 – 2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya akan menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah seperti yang tertera pada Tabel 4.1.

Dari Tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran serta indikator tujuan dan sasaran pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dapat diukur secara persentase capaian sekali setahun sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sejak Tahun 2021-2026. Berikut ini penjabaran secara terperinci dan lebih jelas lagi apa saja tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah itu akan dicapai dalam jangka lima tahun sesuai dengan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dari Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran itu akan dicapai secara bertahap selama lima tahun sesuai dengan situasi dan kondisi anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Misi RPJMD : Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Tujuan RPJMD : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Sasaran RPJMD : Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi						Proyeksi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	SEKRETARIAT															
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			C	C	C	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Meningkatnya kualitas imPlementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	C	C	C	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat												
	Meningkatnya profesionalisme ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan			0	0	2 Orang	2 Orang	0	0	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
			Meningkatnya Kinerja ASN	ASN yang tersertifikasi kompetensi	0	0	2 Orang	2 Orang	0	0	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
KOMINFO																
	Meningkatnya OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			0	19 OPD	30 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
			Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	0	19 OPD	30 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	
								1 Naga ri	1 Naga ri	1 Naga ri	1 Nagari	10 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari
												10 SMP	20 SMP	25 SMP	25 SMP	33 SMP
												10 SD	20 SD	30 SD	40 SD	50 SD
									1 Pusk esma s	1 Pusk esma s	1 Puskes mas	5 Puskes mas	8 Puskes mas	11 Puskes mas	13 Puskes mas	13 Puskes mas
	Meningkatnya layanan publik yang	Persentase layanan publik yang diselenggarakan			0	3 layan an	15 layan an	22 layan an	42 layan an	43 layan an	43 layana n	52 layana n	57 layana n	62 layana n	67 layana n	72 layana n

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi						Proyeksi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	secara on line dan terintegrasi	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	0	3	15	22	42	43	43	10 Aplikasi Baru	15 Aplikasi Baru	20 Aplikasi Baru	25 Aplikasi Baru	30 Aplikasi Baru
	Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah			0%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	85%	87%	90%	93%	95%
			Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	2 Klp	6 Klp	11 Klp	11 Klp	11 Klp	11 Klp	65%	70%	75%	80%	85%
				Jumlah informasi kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan melalui media internal pemerintah daerah								100 Berita	200 Berita	300 Berita	400 Berita	500 Berita
				Jumlah peliputan informasi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah								100 Kali	200 Kali	300 Kali	400 Kali	500 Kali
				Jumlah kerjasama media swasta untuk penyebaran informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah								20 Media	20 Media	20 Media	20 Media	20 Media
	SANDI															
	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	persentase perangkat daerah yang menerapkan sistem informasi persandian			0 OPD	0 OPD	0 OPD	2 OPD	2 OPD	2 OPD	10 OPD	15 OPD	20 OPD	25 OPD	30 OPD	38 OPD
			Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	persentase aplikasi yang dilakukan asesment			2 Web	21 web, 4 Aplik asi	21 web, 4 Aplik asi	21 web, 4 Aplik asi	21 web, 4 Aplikasi	5 Aplikasi	10 Aplikasi	15 Aplikasi	20 Aplikasi	25 Aplikasi
			Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital				2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	40%	50%	60%	80%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi						Proyeksi					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	STATISTIK															
	Terwujudnya satu data DharmaSraya	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
		Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan	Persentase Terpenuhinya Data Statistik Sektoral		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	60%	70%	80%	90%	100%
			Jumlah Nagari Statistik					1 Nagari	1 Nagari	1 Nagari	1 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari	52 Nagari
			Jumlah Kecamatan Statistik									2 Kecamatan	4 Kecamatan	6 Kecamatan	9 Kecamatan	11 Kecamatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini akan dikemukakan strategis dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dengan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2022-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Dari Tabel 5.1. diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai visi yaitu Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya dan misi yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah. Hal itu dapat dicapai melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Demikian strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam jangka waktu lima tahun, sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Dharmasraya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2022-2026.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		SEKRETARIAT				
	Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri Dan Berbudaya	4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah
						Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
				Meningkatnya sarana infrastruktur komunikasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Ketatalaksanaan Pelayanan	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
						Pembangunan Infrastruktur Pusat Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah
						Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Kelembagaan Pelayanan Publik
		KOMINFO				
		4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Ketatalaksanaan Pelayanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Representatif dan Berbasis Teknologi Informasi

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara on line dan terintegrasi	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Penyediaan kebijakan/regulasi komunikasi dan informasi untuk mendorong penyelenggaraan SPBE (efisiensi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik)
			Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi untuk Pelayanan Publik
						Peningkatan Penyebarluasan dan Pemerataan Informasi Publik kepada Masyarakat
						Peningkatan Tata Kelola Penyebarluasan Informasi Publik kepada Masyarakat
						Peningkatan Kualitas Layanan Telekomunikasi Masyarakat
		SANDI				
		4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya pengamanan informasi pemerintah daerah	Meningkatnya pengamanan sistem informasi persandian	Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Peningkatan Keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan atau ancaman siber
				Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Ketatalaksanaan Pelayanan	Peningkatan kemampuan pengamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan atau ancaman siber
		STATISTIK				Peningkatan penggunaan sandi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik
		4. Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang	Terwujudnya satu data DharmaSraya	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral dalam bentuk DDA dan PDRB

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Efektif dan Efisien		pengambilan kebijakan Pembangunan		Peningkatan Implementasi Dharmasraya Satu Data menuju Indonesia One Data Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Statistik menuju Implementasi Dharmasraya Satu Data Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dikemukakan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk lima tahun sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2026.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakn dalam kurun waktu lima tahun ke depan berisi tentang penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan; menjelaskan tentang apa tujuan dari sebuah program dan kegiatan.
2. Sasaran; merupakan sasaran dari tujuan program dan kegiatan.
3. Indikator; Menjelaskan indikator untuk mengetahui pencapaian program.
4. Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD; Menggambarkan kondisi awal sebelum program dilaksanakan.
5. Target Capaian setiap Tahun; Menjelaskan rincian program dan kegiatan tahunanselama 5 tahun periode masa Renstra dan RPJMD.
6. Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD; Menggambarkan kondisi akhir Renstra setelah 5 Tahun berjalan.

Adapun susunan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 6.1. namun secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	sekretariat							10.786.700.000		8.855.070.000		9.355.841.200		9.406.323.880		10.006.933.182			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya a kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen area perubahan perangkat daerah			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB		BB		BB		BB		BB				
					Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat														
			2.16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Harian Kantor Diskominfo	80%	80%	4.310.600.000	83%	4.739.500.000	85%	5.211.246.800	87%	5.726.940.592	90%	6.300.844.428			
			2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sinkronisasi target kinerja perencanaan dengan Penganggaran	50%	60%	16.000.000	65%	16.320.000	70%	16.646.400	75%	16.979.328	80%	17.318.915			
			2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Buku SAKIP, Renstra, Renja, LPPD, LKPJ	4 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.200.000	4 Dokumen	10.404.000	4 Dokumen	10.612.080	4 Dokumen	10.824.322	Diskominfo	Diskominfo	
			2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan	85%	85%	3.000.000	87%	3.060.000	88%	3.121.200	89%	3.183.624	90%	3.247.296	Diskominfo	Diskominfo	
					Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	93%	93%	3.000.000	95%	3.060.000	96%	3.121.200	97%	3.183.624	98%	3.247.296	Diskominfo	Diskominfo	
			2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya ketepatan pencairan keuangan OPD	75%	80%	4.288.600.000	82%	4.717.060.000	85%	5.188.358.000	87%	5.706.777.640	90%	6.277.030.921			
			2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 23 orang	21 orang	23 orang	4.283.600.000	23 orang	4.711.960.000	23 orang	5.183.156.000	23 orang	5.701.471.600	23 orang	6.271.618.760	Diskominfo	Diskominfo	
			2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Proses rekon, review Keuangan Diskominfo secara semester dan akhir tahun serta penyusunan laporan keuangan	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.100.000	2 Dokumen	5.202.000	2 Dokumen	5.306.040	2 Dokumen	5.412.161	Diskominfo	Diskominfo	
			2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketepatan RKBMd dengan kebutuhan	75%	80%	3.000.000	82%	3.060.000	85%	3.121.200	87%	3.183.624	90%	3.247.296			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					barang													
			2.16.01 2.03.0 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Proses rekon, review Barang Milik Daerah Diskominfo secara semester dan akhir tahun	2 Dokumen	2 Doku men	3.000.000	2 Doku men	3.060.000	2 Doku men	3.121.200	2 Doku men	3.183.624	2 Doku men	3.247.296	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pembayaran SKRD	80%	82%	3.000.000	84%	3.060.000	86%	3.121.200	88%	3.183.624	90%	3.247.296		
			2.16.01 2.04.0 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Proses rekon, review retribusi Diskominfo secara triwulan, semester dan akhir tahun	130 Dokumen	130 Doku men	3.000.000	130 Doku men	3.060.000	130 Doku men	3.121.200	130 Doku men	3.183.624	130 Doku men	3.247.296	Diskominfo	Diskominfo
	Meningkatnya profesionalism e ASN	Meningkatny a Kinerja ASN			ASN yang tersertifikasi kompetensi		5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000		
			2.16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelancaran koordinasi kegiatan dinas	80%	80%	6.476.100.000	83%	4.115.570.000	85%	4.144.594.400	87%	3.679.383.288	90%	3.706.088.754		
			2.16.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya jumlah staf yang mengikuti diklat sesuai bidang kemampuan	0	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000		
			2.16.01 2.05.0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat yang diikuti Staf Diskominfo	0	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Publik	75%	80%	223.000.000	82%	247.160.000	84%	276.123.200	86%	310.849.664	90%	352.491.457		
			2.16.01 2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabel cok round, bola lampu listrik, fetting, dll		10 jenis	3.000.000	10 jenis	3.060.000	10 jenis	3.121.200	10 jenis	3.183.624	10 jenis	3.247.296	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan printer, komputer, laptop, sound system, dll		6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	20.000.000	6 Jenis	20.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	gelas, piring, galon air minum, dispenser, Air Minum isi ulang, gas isi ulang dll		8 jenis	5.000.000	8 jenis	5.100.000	8 jenis	5.202.000	8 jenis	5.306.040	8 jenis	5.412.161	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ATK Kantor		30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	30 Jenis	30.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fitikopi, Jilid dan Cetak	3 jenis	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000	3 jenis	25.000.000	Diskominfo	Diskominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.16.01 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu ke Diskominfo		50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	50 orang	10.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi ke luar dan dalam daerah		35 Orang	120.000.000	35 Orang	144.000.000	35 Orang	172.800.000	35 Orang	207.360.000	35 Orang	248.832.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pelatihan aplikasi baru yang dilaksanakan OPD lain	2 Aplikasi	2 Aplika si	10.000.000	2 Aplika si	10.000.000	2 Aplika si	10.000.000	2 Aplika si	10.000.000	2 Aplika si	10.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana dinas		10 Jenis	3.450.000.000	17 Jenis	1.065.000.000	17 Jenis	1.065.000.000	17 Jenis	565.000.000	10 Jenis	550.000.000		
			2.16.01 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 4 (1 unit), Roda 2 (3 unit)	0	Roda 4 (1 unit)	400.000.000	Roda 2 (1 unit)	15.000.000	Roda 2 (1 unit)	15.000.000	Roda 2 (1 unit)	15.000.000	0%		Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja Kursi, Lemari, Kursi Rapat, dll	0	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	50.000.000	5 Jenis	50.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Command Center th 1	0	1 Unit	3.000.000.000	0		0		0		0		Diskominfo	Kec. Pulau Punjung
			2.16.01 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sapras Gedung Command Center th 2	0			10 jenis	1.000.000.000	10 jenis	1.000.000.000	5 jenis	500.000.000	5 jenis	500.000.000	Diskominfo	Kec. Pulau Punjung
			2.16.01 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketersediaan penunjang Pelayanan Publik	75%	80%	2.787.600.000	82%	2.787.600.000	84%	2.787.600.000	86%	2.787.600.000	90%	2.787.600.000		
			2.16.01 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai dan Surat Terkirim		500 Mate rai, 40 Surat Kelua r	2.000.000	500 Mate rai, 40 Surat Kelua r	2.000.000	500 Mate rai, 40 Surat Kelua r	2.000.000	500 Mate rai, 40 Surat Kelua r	2.000.000	500 Mate rai, 40 Surat Kelua r	2.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	Tagihan Listrik 2 unit, Tagihan Internet 1 Tahun	Listrik 2 unit, Intern et 1 th	500.000.000	Listrik 2 unit, Intern et 1 th	500.000.000	Listrik 2 unit, Intern et 1 th	500.000.000	Listrik 2 unit, Intern et 1 th	500.000.000	Listrik 2 unit, Intern et 1 th	500.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.01 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop, dll	1 Jenis (AC)	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.000.000	5 Jenis	2.000.000	Diskominfo	Diskominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.16.01 2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	THL 13 orang, Programmer 2 orang, K3 1 orang, Sopir 1 Orang, Penjaga Kantor 1 orang	18 Orang	18 Orang	2.283.600.000	18 Orang	2.283.600.000	18 Orang	2.283.600.000	18 Orang	2.283.600.000	18 Orang	2.283.600.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ketepatan umur layak pakai pemanfaatan barang milik daerah	75%	80%	2.500.000	85%	2.750.000	90%	2.750.000	95%	2.750.000	100%	2.750.000		
			2.16.01 2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (2 unit)	2.500.000	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (3 unit)	2.750.000	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (3 unit)	2.750.000	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (3 unit)	2.750.000	Kendaraan Roda 4 (2 unit), Roda 2 (3 unit)	2.750.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.0 1.2.13	Penataan Organisasi	Meningkatnya Penataan organisasi yang sesuai dengan beban kerja	75%	80%	3.000.000	82%	3.060.000	84%	3.121.200	86%	3.183.624	90%	3.247.296		
			2.16.01 2.13.0 1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kesesuaian Beban Pekerjaan antar Bidang dalam Dinas dan Kasi/Kasubag dalam Bidang/Sekretariat	70%	80%	3.000.000	80%	3.060.000	90%	3.121.200	90%	3.183.624	90%	3.247.296	Diskominfo	Diskominfo
	Kominfo							2.925.000.000		3.555.000.000		3.668.000.000		3.802.600.000		1.283.120.000		
	Meningkatnya masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik terhadap Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Daerah			Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65%	85%		87%		90%		93%		95%			
					Jumlah informasi kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan melalui media internal pemerintah daerah		100 Berita		200 Berita		300 Berita		400 Berita		500 Berita			
					Jumlah peliputan informasi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah		100 Kali		200 Kali		300 Kali		400 Kali		500 Kali			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Jumlah kerjasama media swasta untuk penyebaran informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		20 Medi a		20 Medi a	20 Medi a		20 Medi a		20 Medi a				
			2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang terkoordinir		10 Jenis	2.575.000.000	10 Jenis	2.665.000.000	10 Jenis	2.670.000.000	10 Jenis	2.675.000.000	10 Jenis	2.680.000.000		
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah informasi yang diberikan ke masyarakat		100 Berita	915.000.000	200 Berita	1.000.000.000	300 Berita	1.000.000.000	400 Berita	1.000.000.000	500 Berita	1.000.000.000		
			2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Perda/Perbup tentang SPBE	0	1 Perda	100.000.000	1 Perda , 1 Perbu p	100.000.000	1 Perbu p	30.000.000	1 Perbu p	30.000.000	1 Perbu p	30.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media internal Pemerintah Daerah yang dikelola (Majalah, Kalender, Spanduk, Baliho, videotron, Medsos)		6 Jenis	750.000.000	6 Jenis	750.000.000	6 Jenis	750.000.000	6 Jenis	750.000.000	6 Jenis	750.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi yang dipublish melalui media elektronik (PPID)		20 Doku men	65.000.000	20 Doku men	80.000.000	20 Doku men	95.000.000	20 Doku men	110.000.000	20 Doku men	120.000.000	Diskominfo	Diskominfo
	Meningkatnya OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Meningkatnya sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi			Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD	38 OPD		38 OPD		38 OPD		38 OPD		38 OPD			
						1 Nagari	10 Nag		20 Nag		30 Nag		40 Nag		52 Nag			
							10 SMP		20 SMP		25 SMP		25 SMP		33 SMP			
							10 SD		20 SD		30 SD		40 SD		50 SD			
						1 Puskesmas	5 HC		8 HC		11 HC		13 HC		13 HC			
			2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah informasi yang diberikan ke masyarakat		100 Berita	1.660.000.000	200 Berita	1.665.000.000	300 Berita	1.670.000.000	400 Berita	1.675.000.000	500 Berita	1.680.000.000		
			2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	kontrak media	0	10 Medi a	500.000.000	10 Medi a	500.000.000	10 Medi a	500.000.000	10 Medi a	500.000.000	10 Medi a	500.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.02.2.01.08	Kemitraan Pemangku Kemitraan	monev menara utk SKRD	130 Menara	130 Mena ra	150.000.000	130 Mena ra	150.000.000	130 Mena ra	150.000.000	130 Mena ra	150.000.000	130 Mena ra	150.000.000	Diskominfo	Diskominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Bidang Komunikasi dan Informasi (SDM)		3 Orang	10.000.000	5 Orang	15.000.000	7 Orang	20.000.000	9 Orang	25.000.000	11 orang	30.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.02.2.01.13	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Integrasi Jaringan Komunikasi milik Pemerintah Daerah	38 OPD	38 OPD	1.000.000.000	38 OPD	1.000.000.000	38 OPD	1.000.000.000	38 OPD	1.000.000.000	38 OPD	1.000.000.000	Diskominfo	Diskominfo
		1 Nagari				10 Nag		20 Nag		30 Nag		40 Nag		52 Nag				
						10 SMP		20 SMP		25 SMP		25 SMP		33 SMP				
						10 SD		20 SD		30 SD		40 SD		50 SD				
		1 Puskesmas				5 HC		8 HC		11 HC		13 HC		13 HC				
	Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Meningkatnya Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik			Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43 Layanan	52 layanan		57 layanan		62 layanan		67 layanan		72 layanan			
			2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	10 Aplikasi	350.000.000	15 Aplikasi	890.000.000	20 Aplikasi	998.000.000	25 Aplikasi	1.127.600.000	30 Aplikasi	1.283.120.000		
			2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			350.000.000		890.000.000		998.000.000		1.127.600.000		1.283.120.000			
			2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah kawasan yang terkoneksi dengan mobile broadband (kawasan digital, WIFI publik)	5 titik	5 titik	200.000.000	10 titik	200.000.000	15 titik	200.000.000	20 titik	200.000.000	25 titik	200.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Integrasi Rumah Data	19 Unit	22 Unit	50.000.000	34 Unit	50.000.000	46 Unit	50.000.000	61 unit	50.000.000	65 unit	50.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi Aplikasi baru	0	10 Aplikasi	150.000.000	15 Aplikasi	150.000.000	20 Aplikasi	150.000.000	25 Aplikasi	150.000.000	30 Aplikasi	150.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.16.03.2.02.08	penyelenggaraan sistim penghubung layanan Pemerintah	Integrasi aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	200.000.000	5 Aplikasi	200.000.000	7 Aplikasi	200.000.000	10 Aplikasi	200.000.000	12 Aplikasi	200.000.000	Diskominfo	Kab. Dharma sraya
			2.16.03.2.02.11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Jumlah Informasi yang dihasilkan GCIO dalam 1 tahun	0	0		5 Jenis	540.000.000	10 jenis	648.000.000	15 Jenis	777.600.000	20 Jenis	933.120.000	Diskominfo	Diskominfo
	Sandi							200.000.000		200.000.000		300.000.000		350.000.000				
	Meningkatnya pengamanan informasi	Meningkatnya pengamanan			Persentase sistem elektronik yang dilakukan assesment		30%		32%		35%		38%		40%			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	pemerintah daerah	sistem informasi persandian	2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya pengamanan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemda		40%	200.000.000	50%	200.000.000	60%	300.000.000	70%	350.000.000	75%	250.000.000		
			2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah pelaksanaan self Asesment website dan aplikasi		10 web dan 5 Aplikasi	200.000.000	15 Web dan 10 Aplikasi	200.000.000	20 Web dan 15 Aplikasi	200.000.000	30 Web dan 20 Aolikasi	200000000	38 Web dan 25 Aplikasi	100.000.000		
			2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Asesment website oleh BSSN		10 Webs ite OPD	100.000.000	15 Webs ite OPD	100.000.000	20 Webs ite OPD	100.000.000	30 Webs ite OPD	100.000.000	38 Webs ite OPD		Diskominfo	Diskominfo
			2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Asesment Aplikasi oleh BSSN		5 Aplikasi	100.000.000	10 Aplikasi	100.000.000	15 Aplikasi	100.000.000	20 Aplikasi	100.000.000	25 Aplikasi	100.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	persentrase perangkat daerah yang menggunakan sertifikat Digital	2 OPD	15 OPD	50.000.000	20 OPD	100.000.000	25 OPD	100.000.000	30 OPD	150.000.000	38 OPD	150.000.000		
		Meningkatnya Keamanan Pelayanan Pemerintah yang Berbasis Aplikasi	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 OPD	40%	50.000.000	50%	100.000.000	60%	100.000.000	80%	150.000.000	100%	150.000.000	Diskominfo	Diskominfo
	Statistik							450.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000				
	Terwujudnya satu data Dharmastraya	Meningkatnya ketersediaan dan ketepatan data statistik sektoral untuk dasar pengambilan kebijakan Pembangunan			Persentase Terepenuhinya Data Statistik Sektoral		60%		70%		80%		90%		100%			
					Jumlah Nagari Statistik	1 Nagari	20 Nag		30 Nag		40 Nag		52 Nag		52 Nag			
					Jumlah Kecamatan Statistik		2 Kec		4 Kec		6 Kec		9 Kec		11 Kec			
			2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya ketepatan data perencanaan pembangunan		60%	450.000.000	70%	650.000.000	80%	650.000.000	90%	650.000.000	100%	650.000.000		
			2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Statistik Sektoral		40 Jenis	450.000.000	50 Jenis	650.000.000	60 Jenis	650.000.000	70 Jenis	650.000.000	80 Jenis	650.000.000		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN TAHUN 2020	Proyeksi/Target										SKPD	LOKASI
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			2.20.02 .2.01.0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah survey dan rekomendasi BPS	1 kegiatan	3 kegiat an	150.000.000	5 kegiat an	250.000.000	8 Kegia tan	250.000.000	15 kegiat an	250.000.000	20 kegiat an	250.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.20.02 .2.01.0 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku/dokumen metadata statistik sektoral	3 Dokumen	3 Doku men	150.000.000	5 Doku men	250.000.000	5 Doku men	250.000.000	5 Doku men	250.000.000	5 Doku men	250.000.000	Diskominfo	Diskominfo
			2.20.02 .2.01.0 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Kecamatan/ nagari Statistik	0	2 Kec dan 11 nag	50.000.000	4 Kec dan 22 nag	50.000.000	6 Kec dan 36 nag	50.000.000	9 Kec dan 46 nag	50.000.000	11 Kec dan 52 nag	50.000.000	Diskominfo	Kab. Dharma sraya
			2.20.02 .2.01.0 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah diklat, pelatihan, bimtek petugas statistik OPD produsen data dan wali data pepndukung	38 OPD	80 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	120 Orang	100.000.000	130 orang	100.000.000	150 orang	100.000.000	Diskominfo	Diskominfo

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2026.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2026, hal itu dapat dilihat pada Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28. berikut ini :

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2026

Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
SEKRETARIAT						
Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Inspektorat						
ASN yang tersertifikasi kompetensi	0	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
KOMINFO						
Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
	1 Nagari	10 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari
		10 SMP	20 SMP	25 SMP	25 SMP	33 SMP
		10 SD	20 SD	30 SD	40 SD	50 SD
	1 Puskesmas	5 Puskesmas	8 Puskesmas	11 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas
Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	10 Aplikasi Baru	15 Aplikasi Baru	20 Aplikasi Baru	25 Aplikasi Baru	30 Aplikasi Baru
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	65%	70%	75%	80%	85%
Jumlah informasi kebijakan, program prioritas dan kegiatan pembangunan melalui media internal pemerintah daerah		100 Berita	200 Berita	300 Berita	400 Berita	500 Berita

Indikator Sasaran	Kondisi Awal RPJMD 2020	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah peliputan informasi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah		100 Kali	200 Kali	300 Kali	400 Kali	500 Kali
Jumlah kerjasama media swasta untuk penyebaran informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah		20 Media	20 Media	20 Media	20 Media	20 Media
SANDI						
persentase aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	5 Aplikasi	10 Aplikasi	15 Aplikasi	20 Aplikasi	25 Aplikasi
Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	40%	50%	60%	80%	100%
STATISTIK						
Persentase Terpenuhi Data Statistik Sektoral	100%	60%	70%	80%	90%	100%
Jumlah Nagari Statistik	1 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari	52 Nagari
Jumlah Kecamatan Statistik		2 Kecamatan	4 Kecamatan	6 Kecamatan	9 Kecamatan	11 Kecamatan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, serta catatan dan harapan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika maka Renstra dituangkan dalam bentuk program-program pembangunan yang konkrit, terarah dan transparan dalam bentuk usulan program dan kegiatan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi Smart City sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi Smart City ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, dan Informatika disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika

KEPALA DINAS,

RENO LAZUARDI, S.Pd, M.Si
Pembina Tk 1/IVb
NIP. 19751223 200012 1 003